



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 244 TAHUN 1993

T E N T A N G

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan Pembukaan dan Penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta di sekitarnya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 1993 ;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Masyarakat ;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Jis Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1979 dan Nomor 45 tahun 1981 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1978 ;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1063/I/93 tanggal 1 Oktober 1993.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

Pertama : Membuka dan Menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini ;

Kedua : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;

Ketiga : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;

Keempat : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;

Kelima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;

Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 442 buah menjadi 607 buah jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 452 buah menjadi 582 buah jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 291 buah menjadi 350 buah;

Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;

Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Oktober 1993



Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR-RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/ Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tk. I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Dep. Agama di Jakarta;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/Settingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama/Kodya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama untuk dokumentasi.
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 244 TAHUN 1993
 TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

PEMBUKAAN MADRASAH

NO.	PROPINSI	NOMOR		NAMA SEKOLAH	KAB./KODYA	PERUBAHAN DARI
		URT.	SEK.			
1.	D.I. ACEH	1	1	A. MADRASAH IBTIDAIYAH Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sabang	Kodya Sabang	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Merduati Filial Sabang
		2	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paya Bujok Langsa	Kab. Aceh Timur	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pareulak Filial Pilot Proyek Langsa
		3	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jeunib	Kab. Aceh Utara	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pandrah Filial Jeunib
	SUMATERA UTARA	4	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kisaran	Kab. Asahan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Mutiara Kisaran
		5	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pulau Rakyat	Kab. Asahan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Pulau Rakyat Tua, Pulau Rakyat
		6	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Meranti	Kab. Asahan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Rawang Lama Meranti
		7	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Padang Hulu Tebing Tinggi	Kodya Tebingtinggi	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Persiakan Padang Hulu Tebingtinggi
		8	5	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Rambutan Tebing Tinggi	Kodya Tebingtinggi	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Brohol Rambutan Tebingtinggi
		9	6	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lama Bilah Hilir	Kab. Labuhan Batu	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Bangunsari Negeri Lama Bilah Hilir

NO.	PROPIN SI	NOMOR		NAMA SEKOLAH	KAB./KODYA	PERUBAHAN DARI
		URT.	SEK.			
4.	RIAU	34	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Air Bangis	Kab. Pasaman	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bonjol Filial Air Bangis
		35	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Merangin Bangkinang	Kab. Kampar	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Berakit Filial Bangkinang
		36	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tambak Rejo Jangkang Bengkalis	Kab. Bengkalis	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Berakit Filial Tambak Rejo Jangkang Bengkalis
5.	BENGKULU	37	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pematang Bangau	Kab. Bengkulu Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bintungan Manna Filial Pematang Bangau
		38	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Muara Aman	Kab. Rejang Lebong	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Curup Muara Aman
6.	SUMATERA SELATAN	39	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Penggangge	Kab. Musi Banyuasin	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lumpatan Filial Penggangge
		40	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Parit Lalang Pangkal Pinang	Kodya Pangkal Pinang	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sumber Rejo Filial Parit Lalang Pangkal Pinang
7.	LAMPUNG	41	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bandung Baru Adiluwih	Kab. Lampung Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pring Sewu Filial Bandung Baru Adiluwih
		42	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pemenang Pagelaran	Kab. Lampung Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pring Sewu Filial Pemenang Pagelaran
		43	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Yosodadi Metro Raya	Kab. Lampung Tengah	Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Metro Filial Yosodadi Metro Raya

NO.	PROPINSI	NOMOR		NAMA SEKOLAH	KAB./KODYA	PERUBAHAN DARI
		URT.	SEK.			
6.	KALIMANTAN TENGAH	12	6	Madrasah Aliyah Negeri Cikarang	Kab. Bekasi	Madrasah Aliyah Swasta Al Mujahidin Karangasem Cikarang
		13	7	Madrasah Aliyah Negeri Purwakarta	Kab. Purwakarta	Madrasah Aliyah Swasta YAPPI Purwakarta
		14	8	Madrasah Aliyah Negeri Pangandaran	Kab. Ciamis	Madrasah Aliyah Swasta Darul Hidayah Pangandaran
		15	1	Madrasah Aliyah Negeri Selat Tengah	Kab. Kapuas	Madrasah Aliyah Swasta Islamiyah Selat Tengah
		16	2	Madrasah Aliyah Negeri Mangkusari	Kab. Barito Utara	Madrasah Aliyah Swasta Mangkusari
		17	1	Madrasah Aliyah Negeri Kota Baru	Kab. Kota Baru Pulau Laut	Madrasah Aliyah Swasta GUPPI Kota Baru
7.	KALIMANTAN SELATAN	18	2	Madrasah Aliyah Negeri 3 Banjarmasin	Kodya Banjarmasin	Madrasah Aliyah Swasta Mulawarman Banjarmasin
		19	1	Madrasah Aliyah Negeri Tenggarong	Kab. Kutai	Madrasah Aliyah Swasta Hasanuddin Tenggarong
8.	KALIMANTAN TIMUR					

Jakarta, 25 Oktober 1993





KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 676 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI SUMATERA SELATAN.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 18 (Delapan Belas) Madrasah Aliyah Negeri, 33 (Tiga Puluh Tiga) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 37 (Tiga Puluh Tujuh) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2016
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 676 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 18 (DELAPAN BELAS)
MADRASAH ALIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Sumatera Selatan	MAN Pangkalan Balai	MAN 1 Banyuasin
2	Sumatera Selatan	MAN Tanjung Kupang	MAN 1 Empat Lawang
3	Sumatera Selatan	MAN Lahat	MAN 1 Lahat
4	Sumatera Selatan	MAN Arahan	MAN 2 Lahat
5	Sumatera Selatan	MAN Lubuk Linggau	MAN 1 Lubuk Linggau
6	Sumatera Selatan	MAN 2 Lubuk Linggau	MAN 2 Lubuk Linggau
7	Sumatera Selatan	MAN Muara Enim	MAN 1 Muara Enim
8	Sumatera Selatan	MAN Sekayu	MAN 1 Musi Banyuasin
9	Sumatera Selatan	MAN Muara Kelangi	MAN 1 Musi Rawas
10	Sumatera Selatan	MAN Sakatiga	MAN 1 Ogan Ilir
11	Sumatera Selatan	MAN Mesuji Raya	MAN 1 Ogan Komering Ilir
12	Sumatera Selatan	MAN Mesuji	MAN 2 Ogan Komering Ilir
13	Sumatera Selatan	MAN Batu Raja	MAN 1 Ogan Komering Ulu
14	Sumatera Selatan	MAN Muara Dua	MAN 1 Ogan Komering Ulu Selatan
15	Sumatera Selatan	MAN Banding Agung	MAN 2 Ogan Komering Ulu Selatan
16	Sumatera Selatan	MAN Gumawang	MAN 1 Ogan Komering Ulu Timur
17	Sumatera Selatan	MAN Pagar Alam	MAN 1 Kota Pagar Alam
18	Sumatera Selatan	MAN Prabumulih	MAN 1 Kota Prabumulih

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

23	Sumatera Selatan	MTsN Banding Agung	MTsN 2 Ogan Komering Ulu Selatan
24	Sumatera Selatan	MTsN Kota Batu	MTsN 3 Ogan Komering Ulu Selatan
25	Sumatera Selatan	MTsN Pulau Beringin	MTsN 4 Ogan Komering Ulu Selatan
26	Sumatera Selatan	MTsN Martapura	MTsN 1 Ogan Komering Ulu Timur
27	Sumatera Selatan	MTsN Campang Tiga	MTsN 2 Ogan Komering Ulu Timur
28	Sumatera Selatan	MTsN Kota Negara	MTsN 3 Ogan Komering Ulu Timur
29	Sumatera Selatan	MTsN Kangkung	MTsN 4 Ogan Komering Ulu Timur
30	Sumatera Selatan	MTsN Jambat Balo	MTsN 1 Kota Pagar Alam
31	Sumatera Selatan	MTsN I Palembang	MTsN 1 Kota Palembang
32	Sumatera Selatan	MTsN II Palembang	MTsN 2 Kota Palembang
33	Sumatera Selatan	MTsN Prabumulih	MTsN 1 Kota Prabumulih

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 676 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 33 (TIGA PULUH TIGA)
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Sumatera Selatan	MTsN Betung	MTsN 1 Banyuasin
2	Sumatera Selatan	MTsN Tebing Tinggi	MTsN 1 Empat Lawang
3	Sumatera Selatan	MTsN Muara Pinang	MTsN 2 Empat Lawang
4	Sumatera Selatan	MTsN Lahat	MTsN 1 Lahat
5	Sumatera Selatan	MTsN Kota Agung	MTsN 2 Lahat
6	Sumatera Selatan	MTsN Wonokerto	MTsN 3 Lahat
7	Sumatera Selatan	MTsN Lubuk Linggau	MTsN 1 Lubuk Linggau
8	Sumatera Selatan	MTsN Muara Enim I	MTsN 1 Muara Enim
9	Sumatera Selatan	MTsN Lawang Kidul	MTsN 2 Muara Enim
10	Sumatera Selatan	MTsN Fajar Bulan	MTsN 3 Muara Enim
11	Sumatera Selatan	MTsN Lesung Batu	MTsN 1 Musi Rawas Utara
12	Sumatera Selatan	MTsN Sekayu	MTsN 1 Musi Banyuasin
13	Sumatera Selatan	MTsN Lumpatan	MTsN 2 Musi Banyuasin
14	Sumatera Selatan	MTsN Bumi Ayu	MTsN 3 Musi Banyuasin
15	Sumatera Selatan	MTsN Sukarame	MTsN 4 Musi Banyuasin
16	Sumatera Selatan	MTsN Muara Kelingi	MTsN 1 Musi Rawas
17	Sumatera Selatan	MTsN Sakatiga	MTsN 1 Ogan Ilir
18	Sumatera Selatan	MTsN Tanjung Raja	MTsN 2 Ogan Ilir
19	Sumatera Selatan	MTsN Tanjung Laut	MTsN 1 Ogan Komering Ilir
20	Sumatera Selatan	MTsN Tulung Selapan	MTsN 2 Ogan Komering Ilir
21	Sumatera Selatan	MTsN Batu Raja	MTsN 1 Ogan Komering Ulu
22	Sumatera Selatan	MTsN Muara Dua	MTsN 1 Ogan Komering Ulu Selatan

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 676 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 37 (TIGA PULUH TUJUH)
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Sumatera Selatan	MIN Muara Pinang	MIN 1 Empat Lawang
2	Sumatera Selatan	MIN Suka Cinta	MIN 1 Lahat
3	Sumatera Selatan	MIN Lawang Agung	MIN 2 Lahat
4	Sumatera Selatan	MIN Talang Jawa, Lahat	MIN 3 Lahat
5	Sumatera Selatan	MIN Bandung Agung	MIN 4 Lahat
6	Sumatera Selatan	MIN Wonorejo	MIN 5 Lahat
7	Sumatera Selatan	MIN Lubuk Kupang	MIN 1 Kota Lubuklinggau
8	Sumatera Selatan	MIN Muara Enim	MIN 1 Muara Enim
9	Sumatera Selatan	MIN Muara Enim II	MIN 2 Muara Enim
10	Sumatera Selatan	MIN Tanjung Raman	MIN 3 Muara Enim
11	Sumatera Selatan	MIN Tambangan Kelekar	MIN 4 Muara Enim
12	Sumatera Selatan	MIN Arisan Musi	MIN 5 Muara Enim
13	Sumatera Selatan	MIN Tenam Bungkuk	MIN 6 Muara Enim
14	Sumatera Selatan	MIN Aremantai	MIN 7 Muara Enim
15	Sumatera Selatan	MIN Fajar Bulan	MIN 8 Muara Enim
16	Sumatera Selatan	MIN Bitis	MIN 9 Muara Enim
17	Sumatera Selatan	MIN Menanti	MIN 10 Muara Enim
18	Sumatera Selatan	MIN Lumpatan	MIN 1 Musi Banyuasin
19	Sumatera Selatan	MIN Penggage	MIN 2 Musi Banyuasin
20	Sumatera Selatan	MIN Mataram	MIN 1 Musi Rawas
21	Sumatera Selatan	MIN Pelawe	MIN 2 Musi Rawas
22	Sumatera Selatan	MIN Sumber Harta	MIN 3 Musi Rawas
23	Sumatera Selatan	MIN Payaraman	MIN 1 Ogan Ilir

24	Sumatera Selatan	MIN Batu Putih	MIN 1 Ogan Komering Ulu
25	Sumatera Selatan	MIN Talang Jawa, OKU	MIN 2 Ogan Komering Ulu
26	Sumatera Selatan	MIN Ulu Danau	MIN 1 Ogan Komering Ulu Selatan
27	Sumatera Selatan	MIN Kemu	MIN 2 Ogan Komering Ulu Selatan
28	Sumatera Selatan	MIN Surabaya	MIN 3 Ogan Komering Ulu Selatan
29	Sumatera Selatan	MIN Pandan Agung	MIN 1 Ogan Komering Ulu Timur
30	Sumatera Selatan	MIN Tawang Rejo	MIN 2 Ogan Komering Ulu Timur
31	Sumatera Selatan	MIN Tanjung Kemuning	MIN 3 Ogan Komering Ulu Timur
32	Sumatera Selatan	MIN Trimo Harjo	MIN 4 Ogan Komering Ulu Timur
33	Sumatera Selatan	MIN Muara Siban	MIN 1 Kota Pagaralam
34	Sumatera Selatan	MIN I Palembang	MIN 1 Kota Palembang
35	Sumatera Selatan	MIN II Palembang	MIN 2 Kota Palembang
36	Sumatera Selatan	MIN Talang Ubi	MIN 1 Penukal Abab Lematang Ilir
37	Sumatera Selatan	MIN Prabumulih	MIN 1 Kota Prabumulih

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN